

**IDENTITAS SOP
AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KANTOR CAMAT SANGGATA UTARA</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>B-000.8.3.3/-2300 /KEC.SGT.U-02</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>02 Januari 2024</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>02 Januari 2024</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td></td></tr> </table>	Nomor SOP	B-000.8.3.3/-2300 /KEC.SGT.U-02	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	02 Januari 2024	Disahkan oleh											
Nomor SOP	B-000.8.3.3/-2300 /KEC.SGT.U-02																				
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024																				
Tanggal Revisi	-																				
Tanggal Efektif	02 Januari 2024																				
Disahkan oleh																					
<table border="1"> <tr> <td>SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</td><td>Nama SOP</td><td>Akurasi Penyampaian Informasi Publik</td></tr> <tr> <td>Dasar Hukum</td><td>Kualifikasi pelaksana</td><td></td></tr> <tr> <td> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik </td><td> 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi </td><td></td></tr> <tr> <td>Keterkaitan</td><td>Peralatan/perlengkapan</td><td></td></tr> <tr> <td> 1. Pendokumentasian Informasi Publik 2. Pelayanan Informasi </td><td> 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan internet </td><td></td></tr> <tr> <td>Peringatan</td><td>Pencatatan dan pendataan</td><td></td></tr> <tr> <td>Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik</td><td> 1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy </td><td></td></tr> </table>	SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nama SOP	Akurasi Penyampaian Informasi Publik	Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana		1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi		Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan		1. Pendokumentasian Informasi Publik 2. Pelayanan Informasi	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan internet		Peringatan	Pencatatan dan pendataan		Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik	1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	
SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nama SOP	Akurasi Penyampaian Informasi Publik																			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana																				
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi																				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan																				
1. Pendokumentasian Informasi Publik 2. Pelayanan Informasi	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan internet																				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan																				
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik	1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy																				

PROSEDUR AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			Waktu	MUTU BAKU	KETERANGAN
		Petugas Informasi	Pemohon	PPID			
1	Mengarahkan Pemohon mengisi buku tamu terlebih dahulu lalu ke meja PPID				Informasi & buku tamu	1 menit	mengisi buku tamu
2	Mengajukan Informasi Publik				1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy KTP Pengurus (jika kelompok) 3. Fotocopy SK Pengurus (jika kelompok) 4. Formulir Permintaan informasi	2 menit	1. Formulir Permintaan Informasi yg sudah diisi 2. Berkas Persyaratan Pemohon 3. Nomor register permohonan informasi
3	Daftar Register Permohonan Informasi				1. Formulir Permintaan Informasi yg sudah diisi 2. Berkas Persyaratan Pemohon 3. Nomor register permohonan informasi	10 menit	Data Register Permohonan informasi
4	Analisa Permohonan Informasi				Formulir Permintaan Informasi yg sudah diisi	60 menit	Informasi Publik yang diminta sesuai
5	Penyampaian Informasi Publik (Informasi Seluruhnya/informasi Sebagian/informasi ditolak)				1. Formulir Surat Pemberitahuan Tertulis 2. Berkas Persyaratan Pemohon 3. Nomor register permohonan informasi	3 menit 5 menit	1. Formulir Surat Pemberitahuan Tertulis yg sudah diisi 2. Informasi Publik yang diminta